

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Cuvilier E, and Almaroof S. (2015). *A Jordan Ombudsman Bureau with Enhanced Capacity*. Mena Knowledge and Learning
- Hartono, S., Masthuri, B., Rochmaeni, E., & Winarso. (2003). *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional
- Kaho, Josef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Meltzer, D.L. (1996). *Strengthening the Ombudsman Institutions in Asia*. Asian Development Bank *e-book*
- Moenir, H. A. S. (1995). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Prabawati, N. P. A., Pascarani, N. N. D., & Supriliyani, N. W. (2015). Peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Denpasar). *CITIZEN CHARTER*, 1(2)
- Puruhito, G., Harsasto, P., & Adnan, M. (2014). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Peningkatan dan Perbaikan Pelayanan Publik. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(4), 16-30
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Reif, Linda C. (2004). *The Ombudsman, Good Governance and The International Human Rights System*. Springer Science and Busines Media
- Rohmah, Usisa. (2013). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Dalam Menangani Laporan/Keluhan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 72-81
- Sa'ud, U. S., & Sumantri, M. (2007). Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Silalahi, Ulbert. (2002). *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru

Sujata, Antonius, dan RM Surahman. (2002). *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional

Sujata, Antonius, dkk. (2002). *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional

Wicaksono, M. Arif., dan Suranto. (2014). Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyadaran Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik. *Journal of Governance and Public Policy*, 1(1)

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Regulasi

Bergman, Elin. (2014). *Ombudsman Institutions*. Laporan Presentasi Workshop On The Role Of The Check And Balance Institutions

Dewi, Dyah Adriantini S. (2016). *Kolaborasi, Integrasi, Partisipasi: Suatu Model Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*. (Doctoral dissertation, Diponegoro University)

Reif, Linda C. (2000). Building Democratic Institutions: *The role of human rights Institutions in good governance and human rights protection*. The Harvard human rights journal

Salthory, A.D. (2011). Pengaruh Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Mandiri Pedesaan (*Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang*). Universitas Lampung

Sujata, Antonius. (2002). Resume Kasus dan Permohonan Klarifikasi. Makalah TOT Ombudsman Nasional. Jakarta: 5-7 Februari

Wardana, R.P. (2017). Implementasi Program Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di DIY (Studi Kasus: Ombudsman RI Perwakilan DIY). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Nomor 871 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Nomor 872 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA Negeri dan SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018

Laporan Pelaksanaan Tugas Triwulan Kedua Tahun 2017 Lembaga Ombudsman DIY

Laporan Pelaksanaan Tugas Triwulan Ketiga Tahun 2017 Lembaga Ombudsman DIY

Media Online dan Website

Suastha, Riva D. 2016. UNESCO Soroti Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/unesco-sorotikesenjangan-kualitas-pendidikan-di-indonesia>. Diakses pada 17 Oktober pukul 08.00 WIB

Ridhoi, M. Ahsan. 2017. Pro Kontra Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru. <https://tirto.id/pro-kontra-sistem-zonasi-dalam-penerimaan-siswa-baru>. Diakses pada 17 Oktober pukul 20.00 WIB

Sekretariat SDGs Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas. 2017. Apa itu SDGs?. <http://sdgsindonesia.or.id/index.php/apa-itu-sdgs>. Diakses pada 14 Oktober pukul 13.00 WIB

Siaran pers Ombudsman RI. 2017. Praktek Maladministrasi yang Terus Berulang Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru. Tahun 2017. <http://www.ombudsman.go.id/index.php/berita/siaran-pers-ombudsman/-praktek-maladministrasi-yang-terus-berulang-dalam-penyelenggaraan->

penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017.html. Diakses pada 17 Oktober pukul 10.00 WIB

<https://www.kemdikbud.go.id>

<http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopmentgoals>

<http://www.ombudsmanassociation.org>

<http://ombudsman.go.id>

[http:// lo-diy.or.id](http://lo-diy.or.id)

<http://ppdb.jogjaprovo.go.id>

<https://diy.siap-ppdb.com>